

BAB I

PENDAHULUAN

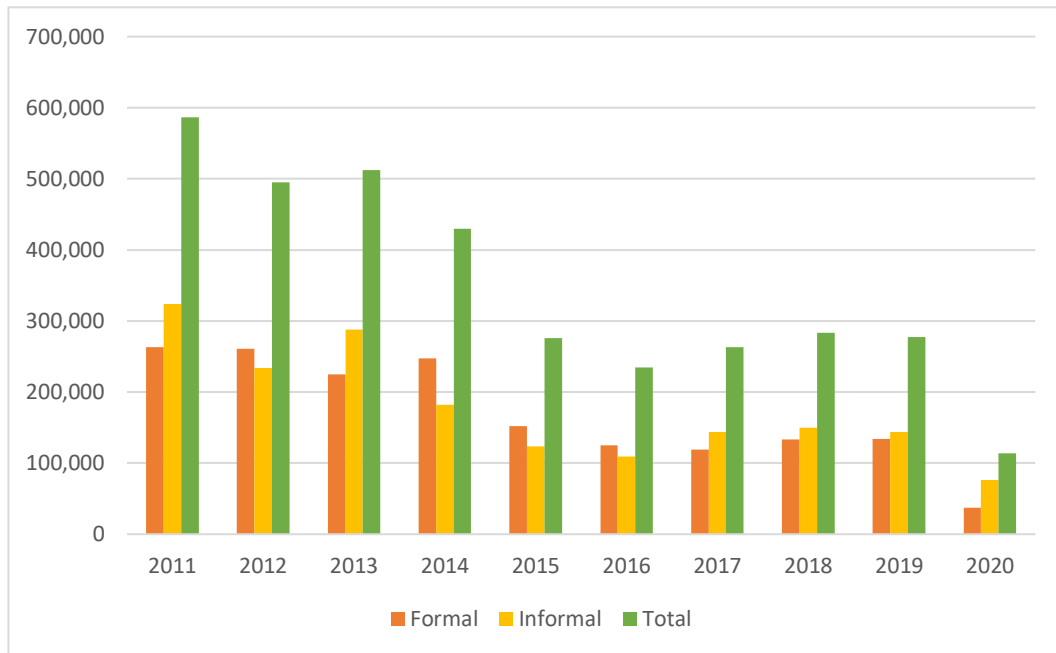
1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi suatu negara pada umumnya terjadi di negara berkembang. Indonesia adalah negara berkembang. Perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia mengatasi kendala yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan masalah kependudukan. Tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi akan secara langsung mempengaruhi perkembangan angkatan kerja dan ketidakseimbangan kesempatan kerja. Paradigma pemerintah mendorong terhadap migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) sebagai upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja (Tribunnews, 2020). Migrasi merupakan perpindahan sumber daya manusia yang umumnya disebabkan oleh alasan ekonomi, seperti menyangkut pekerjaan (Mulyadi, 2003: 28).

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri merupakan regulasi pemerintah dalam menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja diluar negeri dengan dasar setiap tenaga kerja mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 mencatat 138.221.938 angkatan kerja dengan jumlah yang bekerja sebesar 92,93% atau 128.454.184 penduduk yang bekerja, dan tersisa sebesar 7,07% atau 9.767.754 pengangguran di Indonesia. Dengan kesempatan kerja yang terbatas menyebabkan para pekerja pergi bekerja ke negara lain.

Menurut Todaro (2003: 376) Keputusan bermigrasi adalah keputusan yang mengharapkan adanya perbedaan pendapatan di daerah asal dengan daerah tujuan. Sesuai yang dinyatakan Everett S Lee (1966) dalam Mulyadi (2015: 129) mengemukakan bahwa keputusan individu melakukan migrasi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong atau *push factor* berkaitan dengan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara suatu negara dengan negara lain. Kepadatan penduduk yang tinggi mengakibatkan keterbatasannya jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah pengangguran yang semakin tinggi, perbedaan penghasilan suatu negara dengan negara lain, keadaan ekonomi yang miskin di daerah asal, dan alasan tingkat pendidikan. Sebaliknya faktor penarik atau *pull factor* berkaitan dengan berpindahnya tenaga kerja dari negara yang pertumbuhan ekonominya rendah menuju negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi dan kondisi lingkungan yang baik tentunya terdapat fasilitas di negara tujuan bagi pekerja. Maka apabila daerah asal tidak mampu memenuhi kebutuhannya, seseorang akan mengambil keputusan untuk bermigrasi (Rahmawati, 2010).

Tenaga kerja Indonesia ke luar negeri lebih dominan bekerja pada sektor informal, Adapun jumlah TKI pada sektor formal dan informal dari tahun 2011-2020 disajikan dalam bentuk gambar dibawah ini.



Sumber: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), diolah

Gambar 1. 1 Jumlah Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri pada Sektor Formal dan Informal Tahun 2011-2020 (Orang/Jiwa)

Gambar 1.1 menunjukkan jumlah tenaga kerja Indonesia yang fluktuatif pada sektor formal dan informal. Terlihat pada tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan jumlah tenaga kerja Indonesia pada sektor formal maupun informal. Di tahun 2013 jumlah tenaga kerja Indonesia kembali meningkat namun tidak lebih besar dari tahun 2011. Dalam tiga tahun berturut-turut jumlah tenaga kerja Indonesia mengalami penurunan dan meningkat kembali pada tahun 2017. Di tahun 2019 mengalami penurunan sedikit dari tahun sebelumnya. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan jumlah tenaga kerja Indonesia secara drastis dikarenakan adanya pembatasan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di berbagai negara akibat dari pandemi covid-19. Walaupun seperti itu pada kenyataannya di tahun 2020 tenaga kerja Indonesia pada sektor informal tetap lebih besar 67% atau 76.389

jiwa dibandingkan tenaga kerja pada sektor formal yang jumlahnya 36.784 jiwa. Para migran lebih memilih menjadi TKI informal karena prosedur yang dilakukan untuk menjadi TKI formal memiliki proses yang panjang dan biaya rekrutmen yang mahal untuk dilakukan para migran. Padahal, jika TKI bekerja di sektor formal secara prosedural dapat mengurangi resiko beban kerja yang tidak sesuai dan meminimalisir proses penganiayaan dan pelecehan yang masih kerap terjadi (Mantra, 2015: 214).

Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Banyaknya penduduk di Indonesia yang dibarengi dengan sumber daya manusia yang kurang kompeten seringkali menjadi persaingan kerja. Sebagai salah satu akibatnya adalah banyaknya jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (Meilinda, 2017). Adapun persentase migrasi TKI berdasarkan provinsi di Indonesia pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Persentase Jumlah Migrasi TKI Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2020

Provinsi	2020		
	Jumlah Migrasi TKI	Jumlah Penduduk	Persentase
Aceh	119	5.274.871	0,002%
Sumatera Utara	2.814	14.799.361	0,019%
Sumatera Barat	216	5.534.472	0,004%
Riau	195	6.394.087	0,003%
Jambi	95	3.548.228	0,003%
Sumatera Selatan	534	8.467.432	0,006%
Bengkulu	158	2.010.670	0,008%
Lampung	9.192	9.007.848	0,102%
Kep. Bangka Belitung	5	1.455.678	0,000%
Kepulauan Riau	54	2.064.564	0,003%

DKI Jakarta	356	10.562.088	0,003%
Jawa Barat	23.246	48.274.162	0,048%
Jawa Tengah	26.419	36.516.035	0,072%
DI Yogyakarta	359	3.668.719	0,010%
Jawa Timur	37.331	40.665.696	0,092%
Banten	809	11.904.562	0,017%
Bali	895	4.317.404	0,021%
Nusa Tenggara Barat	8.261	5.320.092	0,155%
Nusa Tenggara Timur	427	5.325.566	0,008%
Kalimantan Barat	376	5.414.390	0,007%
Kalimantan Tengah	14	2.669.969	0,001%
Kalimantan Selatan	92	4.073.584	0,002%
Kalimantan Timur	38	3.766.039	0,001%
Kalimantan Utara	216	701.814	0,003%
Sulawesi Utara	316	2.621.923	0,012%
Sulawesi Tengah	169	2.985.734	0,006%
Sulawesi Selatan	283	9.073.509	0,003%
Sulawesi Tenggara	87	2.624.875	0,003%
Gorontalo	2	1.171.681	0,000%
Sulawesi Barat	65	1.419.229	0,005%
Maluku	22	1.848.923	0,001%
Maluku Utara	1	1.282.937	0,000%
Papua Barat	1	1.134.068	0,000%
Papua	7	4.303.707	0,000%

Sumber: BP2MI dan BPS, diolah

Tabel 1.1 menunjukkan persentase jumlah migrasi TKI berdasarkan provinsi di Indonesia pada tahun 2020. Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Lampung, Bali, dan Banten merupakan provinsi dengan persentase migrasi tenaga kerja Indonesia terbanyak dengan jumlah penduduk di provinsi masing-masing. Dengan kriteria yang diambil adalah berdasarkan jumlah migrasi TKI lebih besar dari 800 jiwa. Dengan demikian,

delapan provinsi tersebut adalah provinsi yang dipilih penulis untuk diteliti karena memiliki jumlah migrasi TKI terbanyak dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.

Indikator upah minimum sangat berpengaruh dan menjadi faktor utama seseorang untuk memutuskan bermigrasi ke luar negeri daripada di dalam negeri. Karena kecenderungan upah yang di dapat di dalam negeri lebih rendah dengan upah yang akan didapat jika bekerja ke luar negeri (Andias, 2014). Berikut merupakan upah minimum provinsi (UMP) di delapan provinsi pada tahun 2017-2020:

Tabel 1. 2 Upah Minimum Provinsi (UMP) di 8 Provinsi Tahun 2017-2020

Provinsi	2017	2018	2019	2020
Jawa Timur	Rp1.388.000	Rp1.508.895	Rp1.630.059	Rp 1.768.777
Jawa Tengah	Rp1.367.000	Rp1.486.065	Rp1.605.396	Rp 1.742.015
Jawa Barat	Rp1.420.624	Rp1.544.361	Rp1.668.373	Rp 1.810.351
NTB	Rp1.631.245	Rp1.825.000	Rp2.012.610	Rp 2.183.883
Sumatera Utara	Rp1.961.354	Rp2.132.189	Rp2.303.403	Rp 2.499.423
Lampung	Rp1.908.477	Rp2.074.673	Rp2.241.270	Rp 2.432.002
Bali	Rp1.956.727	Rp2.127.157	Rp2.297.969	Rp 2.494.000
Banten	Rp1.931.180	Rp2.099.385	Rp2.267.990	Rp 2.460.997

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Penetapan kenaikan UMP yang ditetapkan Gubernur dinilai berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan UMP yang tinggi menjadi dilema bagi pengusaha dari segi biaya produksi dan keuntungan usaha. Dengan demikian, perusahaan akan dihadapkan pada pilihan menaikkan harga jual atau menurunkan biaya produksi, dengan cara pengurangan angkatan kerja atau

peningkatan pengangguran. Di sisi lain, jika kenaikan UMP terlalu datar, maka kesejahteraan pekerja tidak akan terpengaruh. Kenaikan upah tahunan di delapan provinsi tersebut diikuti dengan peningkatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) (Rismalisa, 2020). Akibatnya, biaya hidup seseorang meningkat dan naik seiring dengan tanggungan anggota keluarga lainnya. Jika kebijakan upah minimum tidak dipertahankan dalam kondisi yang baik, para pekerja akan berusaha mencari penghasilan atau upah lebih untuk dapat menghidupi diri dan keluarganya, salah satunya dengan merantau ke luar negeri untuk mendapatkan upah dan pekerjaan yang lebih baik.

Menurut Mantra (2015: 186) motivasi utama orang melakukan perpindahan dari daerah asal ke daerah tujuan merupakan motif ekonomi. Motif ekonomi ini berupa pekerjaan yang lebih baik dengan pendapatan yang lebih besar. Berikut merupakan beberapa upah minimum yang bisa diterima para migran jika bekerja di negara tujuan pada tahun 2018:

Tabel 1. 3 Upah Minimum per Bulan di Negara Tujuan Utama Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Tahun 2018 (US Dolar)

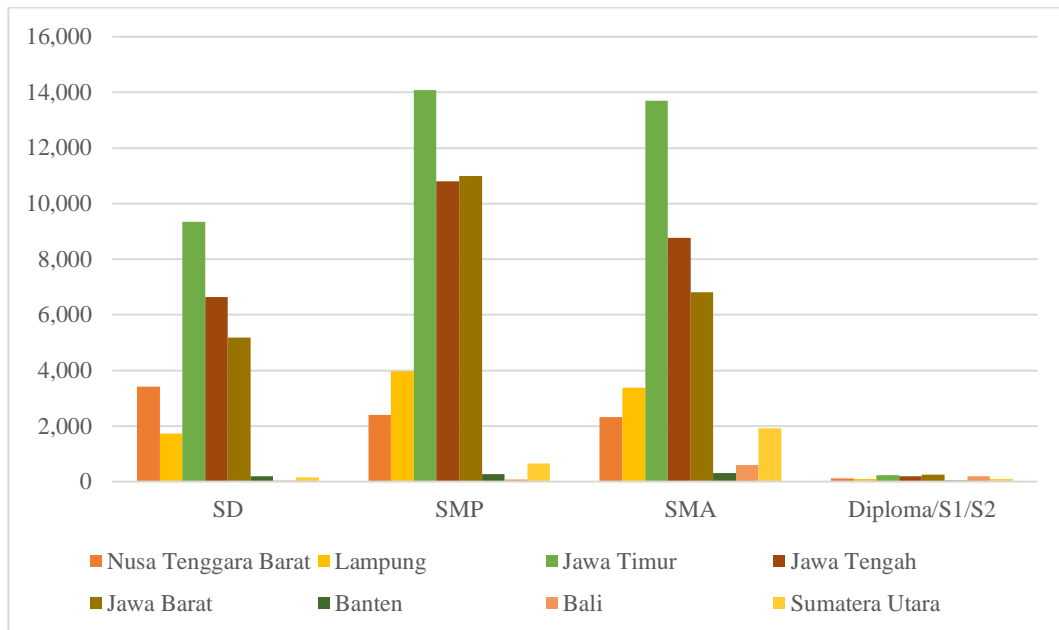
Negara	Upah Minimum per Bulan	Nilai Tukar Rupiah (13.746)
Malaysia	230.80 - 250.86	Rp 3.172.576 – Rp 3.448.321
Hongkong	1055.29	Rp 14.506.016
Taiwan	1119.85	Rp 15.393.458

Sumber: Philippine Statistic Authority

Tabel 1.3 menunjukkan upah minimum perbulan di negara tujuan TKI yang sesuai dengan badan perlindungan pekerja migran Indonesia (BP2MI). Negara Hongkong, Malaysia, dan Taiwan merupakan posisi TKI terbanyak pada tahun

2020. Kebanyakan negara ini dipilih dengan beberapa alasan, yaitu upah minimum yang diterima para migran jauh lebih tinggi daripada upah minimum di daerah asal. Hal ini terlihat dari gaji minimum bulanan yang diterima TKI pada tahun 2018 jika bekerja di negara Hong Kong akan mendapatkan gaji hingga U\$ 1055.29 atau Rp 14.506.016, jika bekerja di negara Taiwan akan mendapatkan gaji hingga U\$ 1119.85 atau Rp 15.393.458, sedangkan di negara Malaysia upah yang didapat tidak terlalu besar atau upah minimum yang ditetapkan di Malaysia tidak berbeda jauh dari batas upah minimum di Indonesia. Negara Malaysia adalah negara dengan jumlah TKI terbanyak dibandingkan negara lain yaitu 15.075 TKI pada tahun 2020. Meskipun upah minimum yang diperoleh selama bekerja di Malaysia tidak berbeda jauh, banyak TKI yang bekerja di Malaysia karena jarak tempuh yang dekat (Mantra, 2015: 218). Oleh karena itu, penetapan UMP di daerah asal menjadi alasan bagi para migran, sebab pendapatan yang diperoleh di negara tujuan lebih menguntungkan secara ekonomi. Dan faktor dominan yang memotivasi seseorang untuk melakukan migrasi adalah sulitnya memperoleh pendapatan di daerah asal dengan melihat adanya pendapatan yang lebih baik di daerah atau negara tujuan, sesuai pada Tabel 1.3 yang memperlihatkan upah minimum yang bisa diterima para TKI jika bekerja di negara tujuan.

Rendahnya tingkat pendidikan seseorang mengakibatkan sulitnya mendapatkan pekerjaan dengan tingkat upah yang tinggi, hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan migrasi menjadi TKI (Andias, 2014). Berikut gambar Jumlah migrasi TKI ke luar negeri berdasarkan tingkat pendidikan di delapan provinsi pada tahun 2020:



Sumber: Badan Pusat Statistika (BPS), diolah penulis

Gambar 1. 2 Migrasi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Berdasarkan Tingkat Pendidikan di 8 Provinsi Tahun 2020

Berdasarkan Gambar 1.2 jumlah tenaga kerja Indonesia dengan pendidikan tamat SD, SMP, dan SMA setiap tahunnya cukup tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja Indonesia yang tamat, sarjana dan pascasarjana. Migrasi TKI berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh tingkat sekolah menengah pertama (SMP) yaitu di provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kemudian, Sumatera Utara, Bali, dan Banten menjadi provinsi dengan tingkat pendidikan SMA terbanyak yang melakukan migrasi TKI. Sementara itu, migrasi tenaga kerja Indonesia dengan tingkat pendidikan terendah yaitu SD berada pada provinsi Nusa Tenggara Barat yang berarti belum tercapainya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan dengan program wajib belajar sembilan tahun yang didanai oleh pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Handayani, 2018).

Adapun data rata-rata lama sekolah di delapan provinsi pada tahun 2017-2020 yaitu:

Tabel 1. 4 Rata-rata Lama Sekolah di 8 Provinsi Tahun 2017-2020

Provinsi	2017	2018	2019	2020
Jawa Timur	7,34	7,39	7,59	7,78
Jawa Tengah	7,27	7,35	7,53	7,69
Jawa Barat	8,14	8,15	8,37	8,55
Nusa Tenggara Barat	6,9	7,03	7,27	7,31
Sumatera Utara	8,98	9,09	9,18	9,33
Lampung	7,79	7,82	7,92	8,05
Bali	8,55	8,65	8,84	8,95
Banten	8,53	8,62	8,74	8,89

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang ini menetapkan tingkat pendidikan minimal sekolah menengah pertama (SMP). Kemudian ada perubahan oleh Mahkamah Konsitusi bahwa pendidikan minimal adalah sekolah dasar (SD) asalkan bisa membaca dan menulis.

Meskipun tenaga kerja Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang rendah, pemerintah telah menerapkan kebijakan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kerja guna memenuhi persyaratan. Jika pekerja migran terus bekerja di negara asal dengan tingkat pendidikan yang rendah, sangat sulit untuk mencari pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang tinggi. Namun, jika dibandingkan bekerja diluar negeri, terutama di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus dan pendidikan tinggi seseorang tersebut akan

memperoleh pendapatan yang lebih besar. Ini adalah salah satu harapan para tenaga kerja Indonesia untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik.

Indikator yang tidak kalah penting adalah kepadatan penduduk, kepadatan penduduk yang tinggi di suatu daerah tentunya membutuhkan kesempatan kerja yang lebih besar, namun terkadang hal ini tidak dapat dipenuhi di beberapa daerah, sehingga kemampuan mencari pekerjaan di daerah lain atau negara lain menjadi lebih besar (Najmusaqib, 2018). Berikut merupakan jumlah kepadatan penduduk di delapan provinsi pada tahun 2017-2020:

Tabel 1. 5 Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²) di 8 Provinsi Tahun 2017-2020

Provinsi	2017	2018	2019	2020
Jawa Timur	822	827	831	851
Jawa Tengah	1044	1048	1058	1113
Jawa Barat	1358	1370	1394	1365
Nusa Tenggara Barat	6,9	7,03	7,27	7,31
Sumatera Utara	195	198	200	203
Lampung	239	242	244	260
Bali	735	746	750	747
Banten	1288	1297	1338	1232

Sumber: Badan Pusat Statistika (BPS), diolah

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di delapan provinsi tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan penambahan penduduk setiap tahunnya, namun tidak sebanding dengan luas wilayah yang tidak akan bertambah besar. Hal inilah yang menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan individu. Permasalahan yang disebabkan oleh kepadatan penduduk yang tinggi berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya seorang individu memutuskan untuk bermigrasi

ke luar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga, ketika di wilayahnya sudah tidak dapat terpenuhi lagi (Najmusaqib, 2018).

Indikator kemiskinan merupakan penyebab utama migrasi internasional, kemiskinan dipandang sebagai pilihan yang rasional karena tekanan yang dihadapi oleh penduduk di negaranya (Hussain, 2008). Kemiskinan merupakan salah satu tekanan atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekaligus menjadi masalah besar yang banyak dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia. Berikut data persentase penduduk miskin di delapan provinsi pada tahun 2017-2020:

Tabel 1. 6 Persentase Penduduk Miskin di 8 Provinsi Tahun 2017-2020

Provinsi	2017	2018	2019	2020
Jawa Timur	11,2	10,85	10,2	11,46
Jawa Tengah	12,23	11,19	10,58	11,84
Jawa Barat	7,83	7,25	6,82	8,43
Nusa Tenggara Barat	15,05	14,63	13,88	14,23
Sumatera Utara	9,28	8,94	8,63	9,14
Lampung	13,04	13,01	12,3	12,76
Bali	4,14	3,91	3,61	4,45
Banten	5,59	5,25	4,94	6,63

Sumber: Badan Pusat Statistika (BPS)

Kemiskinan merupakan salah satu beban atau masalah yang dihadapi masyarakat, serta merupakan masalah utama yang dihadapi banyak negara berkembang seperti Indonesia (Puspitasi dan Kusreni, 2017). Kemiskinan juga akibat dari kurangnya kemajuan ekonomi, menyusutnya kesempatan kerja, dan rendahnya kualitas pendidikan. Terlihat pada Tabel 1.6 Nusa Tenggara Barat dan Lampung menjadi provinsi dengan proporsi penduduk miskin tertinggi, karena pembangunan lapangan kerja oleh investor di daerah tersebut diisi oleh tenaga kerja

dari daerah lain. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kapasitas keterampilan masyarakat setempat. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih bekerja di luar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup yang berkecukupan.

Menurut Hampshire (2002) dalam Nabila dan Pardede (2014) bahwa seseorang yang sangat miskin mungkin akan menjadikan migrasi sebagai pilihan yang paling terakhir ketika alternatif untuk keluar dari status kemiskinan yang lain gagal. Para TKI yang miskin pada akhirnya berhasil keluar dari status kemiskinan setelah bermigrasi ke negara tujuan untuk bekerja. Dengan pengiriman remitansi oleh para TKI untuk keluarga di daerah asal akan membantu para TKI keluar dari garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa solusi untuk keluar dari kemiskinan dapat ditempuh melalui migrasi. Namun, Angkatan kerja yang miskin memiliki hambatan untuk bermigrasi yaitu pada biaya yang akan dikeluarkan untuk perpindahan dari daerah asal ke daerah tujuan. Hambatan biaya ini merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat miskin karena dapat mencegah masyarakat untuk bermigrasi. Sesuai yang dinyatakan World Bank (2015) jika biaya migrasi dapat dikurangi, maka migrasi akan menjadi salah satu program pengentas kemiskinan.

Terkait dengan paradigma pemerintah mendorong terhadap migrasi TKI sebagai upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja, peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Determinasi Migrasi Tenaga**

Kerja Indonesia ke Luar Negeri” (Studi Kasus 8 Provinsi di Indonesia Pada Tahun 2011-2020).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan upah minimum provinsi, rata-rata lama sekolah, kepadatan penduduk, kemiskinan dan migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri (studi kasus 8 provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2020)?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum provinsi, rata-rata lama sekolah, kepadatan penduduk, dan kemiskinan secara parsial terhadap migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri (studi kasus 8 provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2020)?
3. Bagaimana pengaruh upah minimum provinsi, rata-rata lama sekolah, kepadatan penduduk, dan kemiskinan secara bersama-sama terhadap migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri (studi kasus 8 provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2020)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, Maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi, rata-rata lama sekolah, kepadatan penduduk, dan kemiskinan berpengaruh secara parsial terhadap migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri (studi kasus 8 provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2020).

2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi, rata-rata lama sekolah, kepadatan penduduk, dan kemiskinan berpengaruh secara bersama-sama terhadap migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri (studi kasus 8 provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2020).

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang determinasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Lampung, Bali, dan Banten.

2. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan masukan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan baik dalam perencanaan, pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan determinasi Migrasi Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Tasikmalaya melalui pengambilan data dari website Badan Pusat Statistika, BP2MI, dan *Philippine Statistic Authority*.

